

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Penyusunan Renja memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sudah melaksanakan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB, Pengendalian dan Pengembangan serta Sekretariat.

Adapun mekanisme penyusunan Renja dimulai dari penyerapan indikator kinerja program dan kegiatan dan target yang akan dicapai oleh bidang yang melaksanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu kepada Renstra, Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan kesesuaian dengan Renja SKPD Pemko dengan Renja SKPD Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Tahunan Daerah dan menghasilkan perencanaan pembangunan Tahunan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan maksud diatas, Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 bertujuan :

1. Menjabarkan program/kegiatan prioritas kedalam strategi dan arah kebijakan yang fokus secara terinci dan terukur sehingga dapat diimplementasikan.
2. Sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
3. Membangun profesionalisme aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dengan etos kerja melayani.
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan bidang-bidang yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra BPPRD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPRD
- 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPRD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPRD

BAB V. PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terbagi dalam 6 (enam) Sub Kegiatan pada tahun anggaran 2024 sampai dengan juni, adalah sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 703.713.400 dan terealisasi sebesar Rp.190.571.000 atau sebesar 27%.
- b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.355.726.600 dan terealisasi sebesar Rp.377.270.216 atau sebesar 27,82%.
- c. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.360.544.000 dan terealisasi sebesar Rp.163.757.400 atau sebesar 12%.
- d. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp.1.760.529.300 dan terealisasi sebesar Rp.588.161.425 atau sebesar 33,44%.
- e. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. . 644.995.000 dan terealisasi sebesar Rp. 186.651.000 atau sebesar 28,9%.
- f. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 498.727.000 dan terealisasi sebesar Rp.129.930.000 atau sebesar 26%.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Adapun realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA 2024
Eselon III

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Perubahan	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
	Sekretariat					
1	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		A		A	100
2	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persentase	100%		100%	100
	Bidang Pajak & Retribusi Daerah					
1.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Rupiah	104.895.586.175	-	63.982.951.523	60,9
2.	Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	13.327.605.750	-	6.428.879.328	48,23
3.	Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	NPWPD	50	-	28	56
	Bidang PBB & BPHTB					
1	Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	Rupiah	20.522.559.825	--	9.354.481.769	45,5
2	Meningkatkan Penerimaan BPHTB	Rupiah	52.500.000.000	-	24.919.986.836	47,46
3	Menurunnya Tunggakan PBB-P2	Rupiah	7.000.000.000	-	2.732.232.786	39,02
	Bidang Pengendalian Pengawasan					
1	Prosentase Meningkatnya Jumlah Objek Pajak Daerah	Persentase	100%	-	50%	50
2	Prosentase Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evalu					

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA 2024
Eselon IV

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Perubahan	Jumlah Realisasi (sampai dengan juni 2024)	Capaian (%)
Sub Bagian Perencanaan Keuangan						
1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun dengan ketentuan	Dokumen	5		3	100
2	Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	Dokumen	1		1	100
3	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	12		6	50
4	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	52		52	100
5	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	4		4	100
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						
1	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2		1	50
2	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	Paket	7		3	40
3	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2		1	50
4	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	Dokumen	1		1	100
5	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	50		20	30
6	Jumlah unit sarana dan prasana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	56		25	55
7	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		6	50

8	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12		6	50
9	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1		1	100
10	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	Unit	32		16	46
11	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1		-	-
12	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	49		15	35
13	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	5		2	40
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah						
1	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	Dokumen	4		2	50
Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah						
1	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	Dokumen	4		2	50
Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB-P2						
1	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (PBBP-2 & BPHTB)	Laporan	12		6	50
Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB-P2						
1	Jumlah data pelaporan pajak daerah (PBB-P2 & BPHTB) yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	24		20	80
Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian						

	serta pengendalian dan pengawasan paiaik daerah					
	Sub Bidang Penyuluhan dan Pengembangan					
1	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan paiaik daerah	Laporan	8		4	50

Tabel III.18
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Esselon IV Tahun 2024

2.2 Evaluasi RENJA Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja sampai dengan bulan Juni tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. BPPRD

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi sampai dengan Juni 2024	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Bidang PBB & BPHTB					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan PBB-P2	20.522.559.825	3.116.255.900	9.354.481.769	965.431.641
		Meningkatkan Penerimaan BPHTB	52.500.000.000		24.919.986.836	
		Menurunnya Tunggakan PBB-P2	7.000.000.000		Rp.2.732.232.786	
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah (PBB-P2 & BPHTB) yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	24 dokumen	1.760.529.300,-	20 dokumen	588.161.425
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (PBBP-2 & BPHTB)	12 laporan	1.355.726.600,-	6 laporan	377.270.216
2	Bidang PRD					
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Rp.93.895.586.175,-	2.005.539.000,-	63.982.9	

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Verifikasi & Validasi Pajak dan Retribusi Daerah				
		Prosentase Menurunnya Jumlah Penunggak Pajak Daerah	100%		100%	
	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	5 dokumen	498.727.000	2 dokumen	129.930.000
	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	8 laporan	703.713.400	4 laporan	190.571.000
4	Sekretariat					
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	277.110.000	100%	134.174.900
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	27.500.000	3 Dokumen	10.107.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	249.610.000	6 Laporan	124.067.600
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.418.152.100	100%	7.160.544.722
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	14.398.152.100	52 Orang/Bulan	7.152.507.422
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	8.037.300
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan Barang				

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	786.340.850	50%	334.265.820
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	40.540.000	1 Paket	14.457.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	301.587.900	3 paket	85.856.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58.364.450	1 paket	21.958.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.028.500	1 dokumen	880.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	382.820.000	20 laporan	211.113.720
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana Dan Prasarana Apartur dalam Kondisi Baik	100%	220.628.100	100%	29.000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	220.628.100	1 unit	29.000.00
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Internal	100%	234.772.550	100%	65.193.278
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.00		

	Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.905.800	1 Unit	12.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	303.131.350	32 unit	106.118.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit		51 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1.004.720.000	1 Unit	645.182.896
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 unit	38.400.000	15 unit	11.600.000

b. UPT 1

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Tahun 2024 (sampai juni)	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	103.145.500	50%	38.650.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	24.015.000	3 Paket	15.241.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	58.410.500	2 Paket	19.683.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.830.000	1 Paket	3.125.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.090.000	-	-
2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	131.400.000	100%	24.948.666
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.800.000	3 Laporan	15.948.666
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3.000.000	2 Unit	1.000.000
--	--	--	--------	-----------	--------	-----------

c. UPT 2

No	Uraian	Indikator	Target		Realisasi Tahun 2024 (sampai juni)	
			Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	85.810.500	50%	32.436.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	11.966.00	2 Paket	6.896.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	54.734.500	4 Paket	22.930.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.220.000	1 Paket	2.610.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.090.000	2 Laporan	-
2	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1			

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.600.000	12 Laporan	9.000.000
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	35.955.200	50%	15.002.35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	31.155.200	6 Unit	12.602.315
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.800.000	5 Unit	2.400.000

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Analisis kinerja pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Hasil analisis Pencapaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru disajikan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi 2024 (sampai dengan Juni)
Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Rp. 177.918.146.000,-	Rp. 98.800.081.613
Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah	Rp.13.327.605.750,-	Rp. 6.428.879.328
Rasio pendapatan asli daerah (PAD)	100%	-
Deviasi realisasi PAD terhadap APBD	100%	-

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan bahkan lebih dari 100%, tercapainya target kinerja disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Kesadaran wajib pajak daerah dalam membayar pajak daerah.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang menunjang sumber potensi pajak daerah yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan untuk membayar pajak.
- c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia terkait pemungutan dan pengelolaan pajak daerah serta meningkatnya kemampuan dalam berkoordinasi antar bidang.
- d. Pemberitahuan pajak-pajak terhutang kepada wajib pajak tepat waktu, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak daerah sesuai waktu dan sesuai besaran nominal pajak.
- e. Pendataan dan Pemutakhiran data objek pajak daerah secara berkala.
- f. Adanya Inovasi-inovasi yang terus dikembangkan untuk memacu peningkatan PAD dari sektor pajak daerah, diantaranya Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Sadar Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023, Warung PBB yang merupakan singkatan dari “ Wadah Urang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan” yang beroperasi mulai pukul 20.00 WITA hingga 22.00 WITA untuk memudahkan masyarakat membayar PBB-P2 tanpa terkendala waktu, Mengikuti even-even /pameran untuk lebih mensosialisasikan pajak daerah dan mempermudah pelayanan pajak daerah, Pemasangan Alat rekam digital (Tapping Box), Pembayaran secara online untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak daerah.
- g. Digitalisasi dalam pelayanan dan pembayaran PBB dan BPHTB.
- h. Kejelasan SOP pelayanan PBB dan BPHTB.
- i. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
- j. Pemberian reward berupa hadiah dan piagam serta plakat penghargaan kepada wajib pajak.
- k. Adanya upaya untuk terus melakukan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait.
- l. Peran serta dan dukungan pimpinan dalam upaya pencapaian target pajak daerah.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas unsur-unsur

organisasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Penghambat

1. Belum maksimalnya Wajib Pajak dalam penggunaan alat transaksi online (*Tapping Box*) yang telah dipasang;
2. Pemungutan pajak belum mencerminkan nilai *riil* sesungguhnya karena transaksi pembayaran tidak semua transaksi menggunakan bukti bayar;
3. Masih adanya Wajib Pajak resto yang belum menginfokan kepada pembeli / Masyarakat tentang adanya program undian makan berhadiah dari pembayaran pajak resto;
4. Objek pajak reklame banyak yang terpasang dahulu dan baru dibayarkan setelah di tagihkan;
5. Kurangnya pemahaman wajib pajak terkait Pajak BPHTB dan PBB;
6. Kurang optimalnya kerjasama antara BPPRD dengan Kecamatan dan Kelurahan dalam hal pelaksanaan kegiatan pendataan dan penagihan PBB;
7. Lemahnya penindakan dan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB;
8. Data nilai pasar tanah yang belum update;
9. Pemanfaatan database pajak yang masih belum optimal;
10. Banyaknya wajib pajak retribusi yang tidak terdata;
11. Data laporan retribusi yang tidak sama antara system dan laporan dari SKPD pengurus retribusi;

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut diatas akan berdampak pada pencapaian visi misi Walikota yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang

berintegritas dan kompeten dengan sasaran meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah.

2. Faktor Pendorong

1. Adanya upaya untuk terus melakukan pendataan dan pemutakhiran data kepada objek pajak daerah secara langsung kepada Wajib Pajak secara berkala;
2. Adanya pemberian undian berhadiah untuk wajib pajak makan minum berhadiah agar memaju sektor pajak restoran meningkat dan semakin patuh;
3. Adanya inovasi melalui pembayaran online untuk mempermudah Wajib Pajak membayar pajak daerah;
4. Digitalisasi dalam pelayanan dan pembayaran PBB dan BPHTB;
5. Kejelasan SOP pelayanan PBB dan BPHTB;
6. Pemberian reward berupa hadiah dan piagam serta plakat penghargaan kepada wajib pajak;
7. Perluasan jam pelayanan PBB yakni pada malam hari dan event-event / pameran.
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
9. Adanya upaya untuk terus melakukan koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi di Kota Banjarbaru.

Pendapatan pajak dan retribusi daerah diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya didukung dengan potensi yang sangat besar sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, mulai dari proses pendataan dan pendaftaran hingga proses penagihan.

3. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan monitoring terhadap wajib pajak daerah pada malam hari mengenai penggunaan *Tapping Box* yang merupakan alat perekam transaksi;
2. Melakukan koordinasi yang intensif, sosialisasi dan advokasi secara terus menerus tentang pajak daerah;

3. Pendekatan lapangan langsung ke wajib pajak (jemput bola);
4. Meningkatkan SDM melalui Bimtek serta pelatihan;
5. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi secara rutin dengan aparatur kecamatan dan kelurahan;
6. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak melalui media sosial maupun langsung ke wajib pajak;
7. Bekerjasama dengan APH dalam hal penindakan wajib pajak;
8. Melakukan integrasi database dalam hal pemeriksaan status piutang wajib pajak;
9. Memberikan masukan teknis tentang pendekatan renagihan retribusi kepada SKPD pengelola dengan system terjun langsung ke lapangan.

Dengan demikian dalam proses pencapaian peningkatan penerimaan daerah khususnya dari pajak dan retribusi daerah perlu di dukung dengan jumlah SDM yang banyak serta kompeten dan juga di dukung dengan ketersediaan anggaran operasional serta sarana dan prasarana dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu :

“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera (Banjarbaru Juara)”

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Proses yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjabaran rumusan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada rancangan awal RKPD pada dasarnya tidak mengalami perubahan.

Pada Renja SKPD Tahun 2024 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru. Program dan Kegiatan Renja SKPD sesuai Renstra Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru memuat 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak banyak berubah, akan tetapi jenis kegiatan dan target rencana capaian kinerja (besaran/volume) yang sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yaitu pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dikarenakan aspirasi/usulan yang muncul berasal dari usulan SKPD terkait langsung dengan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program prioritas pembangunan bidang urusan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikembangkan tentunya juga selaras dengan Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis SKPD Provinsi dimana sinergi dengan prioritas pembangunan nasional antara lain pembangunan bidang urusan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Pada Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota , memuat **visi** :

“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera”

MAJU adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

AGAMIS adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

SEJAHTERA adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintah yang baik.

Adapun **misi** pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan beakhlak mulia.**
2. **Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.**
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Banjarbaru untuk tahun 2021-2026 maka tujuan dan Sasaran Kerja SKPD masih disesuaikan dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru adalah :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menetapkan sasaran jangka menengah SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Untuk mewujudkan tujuan, perlu menetapkan sasaran pokok yang akan dituju yaitu : ***“Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”.***

Adapun tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah seperti pada table berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Rp.185.000.000.00,-
			Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah	Rp.12.581.944.300,-
			Rasio pendapatan asli daerah (PAD)	100%
			Deviasi realisasi PAD terhadap APBD	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Tahun 2024 adalah **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :**

- a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- c. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- e. Penagihan Pajak Daerah
- f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Dan 1 (satu) program penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

A. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor

- b. Penyediaan Barang Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Unit Pelayanan Teknis Pajak Daerah Wilayah 1 (UPTPD 1)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

C. Unit Pelayanan Teknis Pajak Daerah Wilayah 2 (UPTPD 2)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun perumusan program dan kegiatan Tahun 2024 dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH						24.379.515.216,00										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				12 Laporan	257.110.000,00	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklus						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				15 Laporan	20.000.000,00	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Admnistrasi Umum yang difasillitasi</i>	-			100 %	786.887.600,00			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Kota Banjarbaru	-	916.			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	58.499.600,00	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan 						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan	-			100 %	222.946.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-	-	100.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	4.800.000,00	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-		5.000.000,00	UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II		

